Penerapan *E-Government* dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Provinsi Jawa Barat

Dewi Kurniasih

ABSTRACT

Electronic Government (e-Government) is a very popular term lately. Generally e-Government can be defined as an effort to apply government service through computer based on information system. the effort of the government of West Java Province in supporting e-government is developed Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). The purpose of developing SIMPEG is create offcial database start from Regency level. Province and Home Affairs Department that can accommodate, processing, saving, recovering and distributing officer data which would be as a management supporter to take decision in official sector.

Theory that used in this research is Analysis of e-Government application which be declare by Richardus E. Indrajit that consist of some indicators, that is infrastructure data, legal infrastructure, institutional infrastructure, man infrastructure, technology infrastructure, then leadership and mind strategy. research methode that used is descriptive method with qualitative approach. Data where collected through interview based on determining informant technique, nonparticipant observation, and literature study. Information sources consists of Government apparatus of West Java Province. Determining informant technique that used is purposive sampling.

The result of this observation shows that appying e-government through SIMPEG in West Java Province is not been executes optimally yet, in this case can be caused by some constraint, such as does not have been update management precisely yet. so it foten occuring delaay of distributing official data from each other institute or Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Government of west Java Province for being processed through SIMPEG. Afterwards, for apparatus availability does not have a system analyser yet, who can aarange, planning, an solving problem in SIMPEG organizing, then also having a deep knowledge in official sector.

Keywords : e-government, SIMPEG, government service

Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi ini ditandai dengan semakin berkembang-nya peradaban manusia lewat media informasi teknologi. Tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebutuhan yang sesuai dengan fungsi dari instansi pemerinatahan seperti di bindang kepegawaian memerlukan sebuah sistem infoemasi untuk mengolah data kepegawaian dengan cepat, cermat dan tepat. Fenomena inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan sarana prasaran yang yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

e-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi interaktif antar Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik dari kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun sesama lembaga pemerintahan penerapan e-government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerapan e-government dikalangan lembaga pemerintahan Daerah koni seolah menjadi *trend* di Indonesia. Hampir keseluruhan jenis aplikasi sistem pemerintahan yang dipergunakan pasti melibatkan pengolaham data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah ataupun *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan penerapan e-Government dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Hail ini dikembangkan untuk membentuk sebuah jaringan sistem manajemen dan roses kerja instansi pemerintah terpadu. Penerapan e-Government kini merupakan salah satu infratruktur penting dalam pemerintahan Daerah. Sekaligus memenuhi tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta *accountable*.

Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi Jawa Barat merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan pengembangan sumber daya dan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Guna mendukung tugas tersebut telah dikembangkan sebuah *website* http://setda.melsa.net.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan e-Government di Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat maupun PNS yang ada di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dapat mengakses *website* http://setda.melsa.net.id melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Diantaranya adalah masyarakat dapat mengakses langsung melalui Internet atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dibangun sejak tahun 1994. Namun, kebijakan ini masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal 43 ayat 2 menyatakan perlunya penyelenggaraana pemeliharaan Informasi Kepegawaian kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah yang menggantikan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian

Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian dan di serasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengembangan Sistem Informasi dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang penting. Penetapan SIMPEG perlu ditetapkan dengan keputusan menteri Dalam Negeri. Dengan demikian pengelolaan dan pengembangan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

SIMPEG merupakan terdiri atas perangkat pengolahan yang meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Selain itu juga bias dioperasikan langsung oleh aparatur maupun masyarakat yang memerlukan informasi kepegawaian karena lokasi perangkat ini dapat ditemui disekita Gedung Sate, perangkat SIMPEG ini berjumlah 7 unit yaitu 5 unit diletakkan diGedung Tua (utama), 1 unit di Sekretariat Dewan (DPRD) dan 1 unit di Gedung Baru. Untuk aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat salah satu fungsi dari perangkat SIMPEG ini dapat digunakan sebagai absensi bagi para aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaanya, penerapan e-Government di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui SIMPEG ini masih banyak mengalami kendala. Kendala itu muncul dari segi perawatan dan pengembangannya yang membutuhkan alokasi dana cukup besar. Kendala lain adalah proses *updating* pemutakhiran data kepegawaian. Selain itu kemampuan sumber daya aparatur, yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Perumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi data infrastruktur dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana ketersediaan dasar hukum dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat ?
4. Bagaimana ketersediaan aparatur dalam penerapan e-Govermnet melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat ?
5. Bagaimana ketersediaan sarana teknologi dalam penerapan e-Govermnet melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat ?
6. Bagaimana strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan e-Govermnet melalui SIMPEG di Provindi Jawa Barat ?

Maksud dan Kegunaan Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan e-Government melalui SIMPEG Provinsi Jawa Barat.

Kerangka Teori

E-Government didefinisikan oleh Bank Dunia (World Bank) sebagai :

"e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (suach as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses, and other arms of government." (dalam indrajit, 2004 : 3)

Dalam penerapan e-Government terdapat indikator-indikator penting berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yang bejudul Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi e-Government yang meliputi:

1. Data infrastruktur, meliputi manajemen system, dokumentasi, dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan e-Government.
2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju e-Government.
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan e-Government.
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan e-Government.
5. Infrastruktur teknologi, penerapan e-Government banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6. Infrastruktur pemikiran pemipin, penerapan e-Government sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi e-Government dalam agendanya dan memiliki strategi oemikiran untuk mewujudkannya.

(Indrajit, 2002 : 25)

Menurut Suradinata untuk mendukung pencapaian sasaran manajemen system ada 6 M yakni, Men (Manusia), Materials (Bahan), Machines (Mesin), Methods (Metode), Money (Uang), Market (Pasar) (dalam Anwar, 2004:13). Penerapan e-Govermnet yang dilakukan saat ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat mendapat informasi yang dibutuhkan. Penerapan e-Government ini diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya. Penerapan e-Government saat ini merupakan sebuah tantangan yang besar yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat itu sendiri.

Menurut Indrajit terdapat tiga tantangan besar dalam mengembangkan penerapan e-Government yaitu :

1. Cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

2. Keterlibatan lemabaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komerdial swasta maupun pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun suprastruktur e-Government yang dibutuhkan.
3. Penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional.

(Indrajit, 2002:19)

Dalam menghadapi tantangan di atas, terdapat beberapa pemecahan yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah selaku pihak yang inisiatid untuk menyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan penerapan e-Government tetap memberikan manfaat (Indrajit, 2001: 20). Salah satu manfaat yang diperoleh dalam kebijakan penerapan e-Government adalah dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintaham itu sendiri. Dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih cepat dan efektif.

Kedua, menetukan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan beragam interaksi dala kebijakan penerapan e-Government adalah masyarakat bukanpemerintah (Indrajit, 2002 : 21). Pemerintah cenderung otoriter dalam proses penentuan teknologi yang harus dipergunakan oleh masyarakat. Pemerintah tanpa disadari tidak memperhatikan masyarakat tersebut mampu mempergunaknnya atau tidak. Dengan demikian banyak sekali terjadi kegagalan dari pada keberhasilannya. Pemerintah hendaknya mempunyai gambaran yang akurat tentang teknologi semacam apa yang lebih dikenal masyarakat.

Ketiga, menetukan jenis serta besarnya investasi yang akan dikeluarkan dalam kebijakan penerapan e-Government (Indrajit, 2002 : 22). Pemerintah harus memiliki cetak biru (*masterplan*) yang jelas mengenai arah kebijakan penerapan e-Government tersebut diadakan. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan sekaligus memberikan jaminan kepada pihak lain yang terlibat dalam kebijakan penerapan e-Government tersebut.

Keempat. Kesepakatan seluruh penyelenggara pelayanan dalam menggunakan teknologi yang bersifat universal dan berbasis Internet (Indrajit, 2002 : 22). Kesepakatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memilih berbagai kanal akses yang dimilikinya. Berbagai teknologi informasi di dunia dapat turut berpartisipasi menawarkan beragam produk-produk dan jasanya. Selain itu kecepatan perkembangan teknologi informasi di dunia tidak akan secara signifikan mempergaruhi tahapan dalam pengembangan yang telah disepakati.

Kelima, pemerintah dengan mitranya harus memiliki mekanisme penkaminan hak-hak *privacy* individu maupun masyarakat (Indrajit, 2002 : 23). Masyarakat akan memilih menggunakan cara konvesional karena menurut mereka jauh lebih aman dan mereka memilihi hak kontrol yang jauh lebih besar. Dengan demikian penjaminan hak-hak dalam kebijakan penerapan e-Government sangat diperlukan karena tanpa adanya mekanisme tersebut maka masyarakat akan cenderung memilih cara-cara

konvesional dalam berhubungan dengan pemerintah.

Keenam, pemerintah harus memiliki strategi serta mempertahankan kinerja yang baik (Indrajit, 2002 : 23). Pada dasarnya fungsi kanal akses tersebut adalah agar pemerintah dapat menjangkau masyarakatnya. Adapun tujuan memiliki serta mempertahankan kinerja yang baik adalah agar masyarakat tetap dan selalu memilih menggunakan fasilitas beijakan penerapan e-Government dibandingkan dengan cara-cara kovensional.

Objek dan Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang dapat mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengamatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapaun teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah observasi non pastisipan, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat merupakan suatu pemahaman yang diperoleh hasil pengamatan dari sebuah aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh bagi aparatur yang berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dala penerapan e-Government melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ktersediaan manajemen sistem, adanya dukumentasi ketersediaan data yang berkualitas dan menjaga keamanan data.

Ketetapan prosedur kegiatan serta sumber daya finansial sebagai sebuah acuan dalam bekerja. Idelanya biaya tersebut harus dapat sesuai dengan kebutuhan. Sumber biaya untuk menunjang pengembangan dan pembangunan SIMPEG di Biro kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian ditunjang oleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Ketetapan prosedur kegiatan sudah bisa dikelola dengan cukup baik sesuai dengan tugas dan fungsi biro kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi sebagai pengelola SIMPEG. Kegiatan tersebut meliputi *update* data kepegawaian dari masing-masing SKPD, mengolah data absensi pegawai, evaluasi data kepegawaian tiap bulan, mencari dan menemukan informasi-informasi yang menarik untuk dijadikan sebagai informasi dalam menu informasi kepegawaian dalam *content* menu SIMPEG.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada SIMPeg ini merupakan salah satu elemen strategis dan sangat

menentukan keberhasilan penerapan e-Govemment.

Dalam rangka penyusunan anggaran untuk pengembangan SIMPeg ini, dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan yang lebih ditekankan kepada rencana kebutuhan infra- struktur, seperti pengadaan sarana teknologi. Hal ini disebabkan spectrum teknologi informasi yang dipergunakan didalam penerapan e-government melalui SIMPeg ini sangatlah lebar, dari yang paling murah sampai dengan yang paling canggih.

Dalam penyelenggaraan pemenuhan dokumentasi kepegawaian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kelengkapan alat untuk mendukung pengumulan data. Kedua adalah tempat untuk menyimpan semua data kepegawaian dan yang ketiga adalah dalam mengevaluasi data kepegawaian. Dokumentasi data dimaksudkan untuk penyimpanan data kepegawaian yang diperlukan dalam sistem informasi. Berdasarkan hasil wawancara alat yang digunakan dalam proses dokumentasi tersebut berupa kamera digital, Scanner dan beberapa unit komputer. Penyimpanan dokumentasi adalah sebagai salah satu faktor penunjang. Hal ini dapat membantu dalam proses pencarian data.

Dokumentasi dalam penerap-an e-Govemment melalui SIMPeg disimpan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dokumentasi tersebut diantaranya berupa lemari Arsip, masing-masing data pegawai dalam satu folder dan disusun berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bentuk lain dalam menyimpan dokumentasi atau arsip dan data pegawai yang berupa data elektronik, disimpan pada sebuah komputer dan laptop yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sehingga terhindar dari pencurian data. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk lebih mengetahui kekurangan dalam memberikan informasi. Adanya evaluasi data dilakukan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan dalam pengumpulan data. Evaluasi data juga dapat digunakan sebagai penilaian dari beberapa instansi dalam memberikan data. Penilaian sejauhmana SKPD-SKPD tersebut dapat mengupdate sebuah data kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebuah informasi yang akan diolah ke dalam SIMPeg.

Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi Untuk memperoleh data yang berkualitas diperlukan adanya keakuratan data, ketetapan waktu dalam memberikan data, adanya data yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Ketersediaan data dalam penerapan e-Govemment melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan yang direncanakan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah beberapa SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang tanggap dalam memberikan data kepegawaiannya. Sehingga hal tersebut membuat keterlambatan dalam meng*update* data kepegawaian pada instansi/ SKPD di Pemerintah ProvinsiJawa Barat.

Aspek yang terpenting dari sistem informasi manajemen khususnya SIMPeg adalah analisis terhadap data kualitas data. Pemeriksaan kualitas data dapat dilakukan dengan melakukan survey

terhadap persepsi user atas kualitas data, kemudian melakukan survey terhadap seluruh file-filedata dan yang terakhir melakukan survey untuk sampel data dari file data. Walaupun tidak terlalu umum melakukan pemeriksaan terhadap kualitas data, namun organisasi dalam hal ini Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian sebagai pengelola SIMPEG tidak memiliki cara lain untuk mengetahui pada tingkat apa SIMPEG yang dikelolanya tidak akurat, tidak lengkap atau menyajikan informasi yang tidak jelas.

Data yang tidak akurat, tidak tepat waktu atau tidak konsisten dengan sumber informasinya, dapat menciptakan masalah operasional bagi aktivitas pengelolaan data kepegawaian. Pada saat data yang tidak tepat dan tidak tercatat, maka akan menyebabkan diambilnya keputusan dibidang kepegawaian yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa untuk mengurangi resiko kesalahan darr untuk mengantisipasi teijadinya gangguan keamanan data seperti musibah, error system, dan kejahatan komputer serta rendahnya tingkat keamanan diperlukan suatu kebijakan dan prosedur khusus yang harus dimasukkan pada saat merancang dan mengimplementasikan SIMPeg.

SIMPeg yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat sistemnya telah online. Jadi bentuk pengendalian keamanan datanya harus menjadi prioritas utama. Untuk mengaman-kannya dapat menggunakan *firewall*, yang berfungsi untuk melindungi data dari orang-orang yang tidak berwenang menggunakannya. *Firewalls* ini biasanya ditempatkan antara *LAN (Local Area Network)* dan *WAN (Wide Area Network)* dan jaringan ekstemal seperti Internet. Perangkat ini dapat mendeteksi kewenangan user sebelum dapat mengakses jaringan. Untuk *firewalls* yang baik, harus ada yang menuliskan dan memelihara ketentuan-ketentuan internal agar dapat mengidentifikasi orang, aplikasi atau alamat secara terperinci yang diperkenankan atau ditolak untuk masuk ke jaringan. *Firewalls* dapat mencegah tetapi tidak sepenuhnya melindungi jaringan dari pemakai yang tidak berwenang sehingga harus disajikan sebagai salah satu elemen dari seluruh rencana pengamanan terhadap SIMPeg. Berdasarkan dari pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa kondisi data infrastruktur dalam penerapan e-Govemment melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat cukup memadai serta memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.

Ketersediaan Dasar hukum dalam penerapan e-Govemment melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan adanya peraturan perundang undangan tingkat pusat sebagai landasan dalam proses sebuah kebijakan. Yang mendasari penerapan e-Government melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelimpahan wewenang seluas-luasnya dari pusat kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut pula lah yang menjadi dasar pertama dari penerapan kebijakan e-Govemment melalui SIMPEG, karena dalam

Undang-undang tersebut diatur beberapa pokok dalam kepegawaian daerah. Terkait dengan penerapan e-Government melalui SIMPEG tersebut, dalam BAB V pasal 134 ayat 4, pokok dari ayat tersebut adalah bahwa pemerintah melakukan pemutakhiran data kepegawaian seperti pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah, untuk mendukung bagian dari undang-undang No.32 Tahun 2004 tersebut pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sebuah alat pendukung yaitu SIMPEG untuk mengolah dan memuktakhirkan data kepegawaian selain itu juga sebagai alat pendukung pengambilan keputusan para pemimpin dibidang kepegawaian. Dasar hukum lainnya yaitu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Dampak dari Inpres tersebut terhadap Kebijakan penerapan *e-Govemment* di Provinsi Jawa Barat adalah SIMPeg koordinasikan dengan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (Bapesitelda) Provinsi Jawa Barat. Dasar hukum selanjutnya, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal 43 ayat (2) menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan Informasi Kepegawaian. SIMPeg Pemerintah Daerah merupakan Sub Sistem dari Sistem Informasi ManajemanDepartemen Dalam Negeri (Simdagri). Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dan pemberdayaan aparatur pemerintah baik di Pusat maupun aparatur di Daerah. Dasar hukum yang paling mendasar adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, ketersediaan dasar hukum yang dijadikan acuan untuk membangun SIMPeg di Provinsi Jawa Barat cukup memadai. Namun dalam beberapa peraturan tidak adanya sanksi dan reward. Dengan demikian, bagi setiap daerah tidak wajibkan untuk membangun SIMPeg. Peraturan-peraturan tersebut hanya bersifat imbauan bagi setiap pemerintah daerah.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Barat belum mengeluarkan peraturan daerah, keputusan Gubemur ataupun petunjuk teknis yang secara khusus mengatur dalam pengelolaan SIMPeg tersebut. Tetapi dalam tugas pokok fungsi Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengelola SIMPeg tersebut diserahkan kewenangannya kepada Sub Bagian Data dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat peraturan tersebut hanya bersifat umum artinya peraturan-peraturan secara teknis dalam penerapan *e-Govemment* Melalui SIMPeg tidak ada.

Koordinasi antar instansi merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi data infrastruktur Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi koordinasi antar instansi dalam penerapan *e-Govemment* melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat belum tercapai

dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki fungsi khusus dalam proses *e-Government* di Provinsi Jawa Barat. Selain itu masih kurangnya pemahaman tentang kegunaan SIMPeg itu sendiri bagi instansi Sehingga seringnya keterlambatan dalam pendistribusian perubahan data kepegawaian dari masing-masingSKPD.

Adapun media yang digunakan dalam menciptakan komunkasi yang baik antar instansi dalam SIMPeg *e-mail, chatting* dan media elektronik lainnya seperti jaringan komputer yang terhubung dari setiap Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan SKPD-SKPD yang berada di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Media seperti ini tentunya bisa memperbaiki proses sharing informasi, koordinasi dan feedback.

Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam penerapan e-Government melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat belum terpenuhi Para aparatur tersebut rata-rata hanya sebagai user dari SIMPeg yang mempunyai tugas mengelola data kepegawaian Tetapi pengetahuan aparatur tentang bahasa pemrograman tentang sistem informasi belum cukup baik sehingga diperhikan konsultan IT yang melibatkan pihak lain.

Berbicara tentang sarana teknologi yang tersedia dalam penerapan e-Govemment merupakan salah satu hal terpenting. Sarana teknologi yang mendukung dapat dilihat dari dua hal umum yaitu adanya jaringan komputer dan software pendukung. Pertama. jaringan komputer, merupakan hal yang penting dalam teknologi informasi Dengan memiliki sarana teknologi yang memadai maka informasi dapat lebih cepat dan beragam untuk diberikan. Selain itu dengan adanya sarana teknologi yang memadai maka akan semakin mudah untuk meng-aksesnya.Dalam penerapan e-Govemment melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat adalah dengan cara merancang sebuah jaringan komputer baik intranet maupun internet yang terhubung ke beberapa Biro yang berada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat jaringan kom-puter tersebut terkoneksi kepada SKPD-SKPD di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Selain bisa mengakses SIMPeg oleh masing-masing SKPD, jaringan komputer tersebut dapat digunakan sebagai media komunikasiserta pendistribusian data kepegawaian oleh masing-masing SKPD kepada pengelola SIMPeg yang berada di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat.

Ketersediaan teknologi berupa jaringan komputer ini berupa jaringan Local Area Network (LAN) dan Wireless Fidelity (WiFi) yang berada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan adanya fasilitas jaringan tersebut maka sarana teknlogi yang mendukung penerapan e-Govemment melalui di SIMPeg di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik.

Kedua, kompuer beserta softwarenya. Dalam penerapan e-Govemment melalui SIMPeg di Provins Jawa Barat terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 8 (Delapan) PC Client, untuk server dan Gateway masing-masing 1 PC,

infodesk 2 PC, antar bagian 3 PC antar Biro 12 PC, masing-masing SKFD sebanyak 43 PC sebagai server. Tetapi jumlah tersebut dapat saja berubah tergantung dari kebutuhan dan anggaran biaya yang memadai untuk penyediaan sarana teknologi sebagai pendukung paling penting dalam pengelolaan SIMPEG.

Adapun dalam ketersediaan program-program yang digunakan untuk merancang dan mengaplikasikan SIMPeg tersebut sudah cukup memadai. Hal ini dapat dicermati dari ketersediaan program yang dipergunakan untuk merancang dan mengaplikasikan SIMPeg seperti penggunaaan bahasa pemrograman statis seperti HTML, bahasa pemrograman dinamis yaitu Oracle versi 10G, *database* dari php MySQL versi 4.020, *web server* dari Apache versi 1331, sistem operasi server dari Linux Fedora core 2, dan *Framework* dari *FuseBox* versi 3.0. Untuk pengak-sesan, disarankan menggunakan Internet Explorer versi 6. adapun pengadaan dan perancangan program-program komputer untuk pengaplikasian SIMPeg tersebut diserahkan pada jasa konsultan.

Selain indikator di atas yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pemikiran pemimpin dalam mendukung penerapan *e-Government.* Seberapa besar komitmen seorang pemimpin dalam penerapan *eGovemment.* Maka pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiiiki visi, strategi, serta pengetahuan yang luas khususnya dalam penerapan *e-Government.*

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kondisi penerapan *e-Govemment* melalui SIMPEG *di* Provinsi Jawa Barat belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam pengiriman data dan informasi mengenai kepegawaian pada masing-masing SKPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan dasar hukum sudah tersedia dengan baik. Sedangkan koordinasi antar instansi dalam penerapan *e-Govemment* sudah cukup baik Hal ini didukung oleh ketersediaan aparatur yang sudah cukup memadai. Hal terpenting adalah ketersediaan sarana teknologi yang sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Strategi pemikiran pemimpin pun dalam penerapan *e-Govemment* melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat sangat menentukan. Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat dirumuskan adalah:

1. Perlu pendistribusian data kepegawaian melalui SIMPeg melalui pendekatan-pendekatan yang terarah dan tepat sasaran sehingga terhindar dari ketidak-akuratan data.
2. Penyusunan peraturan lebih rill sehingga menghasilkan ketegasan untuk membangkitkan kesadaran aparatur dalam *updating* data kepegawaian.
3. Perkuat koordinasi antar instansi dalam penerapan *e-Govemment* melalui SIMPeg di Provinsi Jawa Barat.
4. Perekrutan aparatur sesuai kebutuhan, seperti analis sistem yang mampu mengoptimalkan dalam pengembanganSIMPeg.

5. Perbaharui teknologi agar pengoperasian SIMPeg lebih optimal lagi.

Daftar Pustaka

Anwar, M. Khoirul. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bogi Pemerintahon Di Era Otonomi Daerah, SIMDA.* Yogyakarta:PustakaPelajar.

Indrajit, Richardus Eto, et all.. (2002). *Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi **e**Govemment.* Jakarta: PT Elex Mi… Komputindo.

____. (2004). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital.* Yogjakarta : Andi

____. (2005). *e-Govemment in Action* Yogyakarta:AndiOffset.

Jogiyanto. (2001). *Analisis dan Disain SistemInformasi.* Yogyakarta:AndiOffset.

Moenir, HAS. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta:BumiAks

Zulkarnain. (2006). *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik.* Jakarta:Yappika.

Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2 Tentang Kebijakan dan Strategi Naskah Pengembangan *E-Government.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor …Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.